



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2017 - 2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar/Akademisi (Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D., Dr. Rer.Pol. Rodon Pedrason, M.A., Edy Prasetyono, Ph.D)
Hari, Tanggal : Senin, 25 September 2017
Pukul : 13.15 WIB – 14.10 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Pandangan para Pakar/Akademisi, mengenai RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities in The Field of Defence*).
Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
2. Dr.TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)
3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG)
4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol.
8. Charles Honoris
9. Tuti N. Roosdiono
10. Bambang Wuryanto
11. Djenri Alting Keintjem
12. Junico BP Siahaan

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

13. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si
14. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.
15. Dave Akbarsyah Laksono
16. Bambang Atmanto Wiyogo

17. Yayat Y. Biaro
18. Venny Devianti, S.Sos.
19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

20. H. Ahmad Muzani
21. Martin Hutabarat
22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
23. Rachel Maryam Sayidina
24. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

25. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
26. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
27. H. Darizal Basir
28. Muhamad Afzal Mahfuz, S.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

29. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
30. Ir. Alimin Abdullah
31. Budi Youyastri
32. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

33. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
35. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
36. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

37. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
38. Dr. H. Sukamta, P.Hd.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

39. H. Moh. Arwani Thomafi
40. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
41. H. Syaifullah Tamiha, S.Pi., M.S.
42. H. Muhklisin

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

43. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
44. Prananda Surya Paloh
45. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
46. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

47. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.
48. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.H.

- Anggota yang Izin :
1. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan)
 2. Andreas Hugo Pareira (F-PDI Perjuangan)
 3. Elnino M. Husein Mohi., S.T., M.Si. (F-Gerindra)

4. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M. (F-PD)
5. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., MA (F-PKS)

Undangan : 1. KA. STIN, Dr. Rer.Pol. Rodon Pedrason, M.A.
2. Universitas Padjajaran, Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D.
beserta jajaran

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Kepada kedua narasumber sebetulnya Bapak Edi harus hadir dari UI ya, tapi beliau berhalangan mendadak sehingga tidak bisa, sehingga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Teuku Rezasyah, kemudian Bapak Rodon Pedrason, kemudian Bapak Edi tidak bisa hadir. Dan rekan-rekan yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Salam sejahtera untuk kita semua,
Selamat siang.**

Seperti kita ketahui Komisi I DPR RI itu akan melakukan pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang kerjasama di bidang pertahanan. Jadi kami mau meratifikasi. Dan tentu untuk mengambil keputusan politik kami meminta bantuan barangkali masukan-masukan dari pakar terkait dan hari ini saya kira telah hadir kedua narasumber.

Untuk itu, kami tidak panjang lebar barangkali kami persilakan mungkin dari ba Rodon Pedrason kemudian Bapak Teuku atau Bapak Teuku dulu baru kemudian Bapak Rodon, silakan berkoordinasi mana yang duluan. Setelah paparan mungkin kami akan pendalaman mengenai pandangan-pandangan Bapak dan selanjutnya kita tutup. Saya kira itu saja, kami persilakan dari narasumber.

Saya kira rapat ini terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.15 WIB)

PAKAR (DR. RER. POL. RODON PEDRASON, M.A.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan sidang yang saya muliakan,
Sahabat dan mentor saya Bang Rezasyah yang saya hormati.**

Sejujurnya saya mengatakan ini suatu kehormatan bagi saya mendapatkan undangan menghadiri Rapat Dengar Pendapat ini sebagai narasumber. Bagi saya setiap mendapatkan undangan ke Komisi I DPR RI itu mendorong saya untuk kembali menggali pengetahuan saya, mencoba membekali diri saya. Dan menurut saya untuk memberikan pendapat sesuai dengan bidang yang saya miliki dan syukur-syukur bisa saya tambahkan dengan empiric yang saya punyai.

Mencoba memahami kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini dapat menghentak pengertian kita tentang betapa minimnya berita atau literatur terkait dengan hubungan kedua negara ini. Hiruk pikuk pemberitaan media atau bahkan pembahasan tentang kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini sering terabaikan karena isu lain yang menyedot banyak perhatian orang banyak di negara kita ini.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini sebenarnya bukan sebatas

negara bertetangga, tetapi juga dalam hubungan politik, keamanan maupun ekonomi dimana Papua Nugini sebuah negara yang merdeka yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Khususnya wilayah Provinsi Papua dimana hubungan diplomatic sudah dibangun sejak lama.

Next, hubungan diplomatic Indonesia dengan Papua Nugini itu secara resmi dibuka pada tanggal 16 September 1975. Tidak lama setelah kemerdekaan Papua Nugini menjadi sebuah negara berdaulat. Indonesia memulai atau membangun kerjasama strategis dengan Papua Nugini secara luas meliputi politik, ekonomi Pendidikan dan latihan maupun manajemen perbatasan. Kurang lebih sekitar 760 KM terbentang luasnya perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Yang menjadi fokus Indonesia atau yang menjadi kecurigaan kedua belah pihak dengan berbagai kegiatan diperbatasan tersebut.

Indonesia melalui hubungan diplomatik dan terkadang intimidasi berusaha mencegah Papua Nugini menjadi wilayah persembunyian atau perlindungan bagi sparatis OPM. Memahami hubungan RI atau Indonesia dengan Papua Nugini memerlukan pemahaman peran strategis Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu tentang Papua cenderung mendominasi dialog antara Indonesia dan Papua Nugini dalam berbagai meeting maupun dalam berbagai agreement yang sudah dibuat.

Peran strategis Papua tidak diragukan lagi, baik berupa kerjasama politik dan ekonomi dan akan sangat berbeda jika Papua tidak lagi menjadi bagian dari NKRI. Kedua negara sepakat bahwa kerjasama melalui MoU, penandatanganan Tritis atau agreement dan joint committee yang dinilai memungkinkan melalui lobby-lobby intensif dan pertemuan resmi. Kedua negara sepakat untuk mengamankan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap negara, sumber daya yang ada diperbatasan dan memerangi trans national crime terutama senjata, peyelundupan narkoba dan orang atau lintas batas ilegal maupun ilegal logging.

Berbagai komitmen ini mendorong kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menginisiasi kerjasama strategis dengan Papua Nugini. Kiranya tanggapan saya akan saya fokuskan membahas dua hal, yang pertama terkait dengan kepentingan politik dalam kerjasama Indonesia dan Papua Nugini dan yang kedua mendiskusikan peran strategis Papua yang menunjukkan secara resmi Indonesia mempertahankan Papua sebagai bagian integral NKRI.

Secara teori menurut Keohen, kerjasama sifatnya cenderung atau sangat politis. Dalam sebuah kerjasama negara-negara dapat menyesuaikan atau merubah berbagai perilaku untuk mempromosikan kepentingan negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut. Kerjasama yang dikembangkan haruslah didasari dengan sikap atau prinsip saling menguntungkan, mutual benefit dan Indonesia lebih tertarik dalam hal keuntungan politik yang bakal didapat. Sedangkan Papua Nugini lebih tertarik dengan keuntungan ekonomi yang akan mereka dapatkan.

Saya mencatat setidaknya terdapat 5 bentuk kepentingan politik Indonesia dalam prime of action antara Indonesia dan Papua Nugini, yaitu pertama adalah saling mendukung untuk menjaga kesatuan dan integritas wilayah dan bekerjasama secara erat untuk mempererat hubungan bilateral yang dilandasi semangat saling menghargai persahabatan dan kerjasama dimana secara politis Indonesia menginginkan penghargaan PNG tentang keutuhan wilayah Indonesia.

Yang kedua adalah kepentingan politik Indonesia melali kerjasama dengan PNG secara prinsip diarahkan untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan untuk memerangi gerakan Papua Merdeka. Ketiga, selama periode tahun 70-an sampai saat ini, Indonesia dan PNG memfokuskan kerjasama mereka dalam memerangi sparatisme dan mempertahankan integritas territorial Indonesia.

Pada tahun 74, Indonesia-Australia dalam hal ini mewakili PNG mendatangi sebuah perjanjian untuk perbatasan. Indonesia memandang OPM bukan hanya ancaman terhadap keutuhan wilayah, tetapi lebih daripada itu merupakan ancaman terhadap keamanan Indonesia.

Dibawah perjanjian mutual respect, persahabatan dan kerjasama yang ditandatangani di Port Moresbi pada tanggal 27 Oktober 1986, Indonesia dan PNG sepakat untuk mengakui keutuhan wilayah kedua negara dan menjunjung tinggi prinsip non interverence.

PNG secara serius dan secara spesifik menyatakan kebijakan mereka untuk menentang semua aktifitas dan kampanye yang menentang ataupun agains atau memojokkan Indonesia oleh OPM dan menolak semua bentuk upaya yang dilakukan orang Papua meminta adanya referendum. PNG secara tegas juga menyatakan bahwa akan terus memberikan dukungan

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang dalam pertemuan tingkat tinggi ke-19 di Noumea New Caledonia tanggal 23 Juni 2013 para pemimpin negara-negara MSG tidak dapat mencabut supportnya terhadap Papua untuk sebuah selfdetermination. Namun, pernyataan atau support tersebut seyogyanya kita tafsirkan hanya sebagai bentuk hak-hak politik legal tetapi tidak dapat dibaca sebagai pengakuan politik Papua Barat untuk menjadi sebuah negara merdeka. Analoginya seperti Amerika Serikat, yang selalu mengatakan mendukung Palestina sebagai negara berdaulat tetapi akan melakukan veto untuk mencegah Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka atau berdaulat.

Indonesia getol memahami atau memerangi OPM, sebab secara nyata perbatasan Indonesia, Papua Nugini dimanfaatkan oleh organisasi tersebut sebagai daerah persembuyian dan perlindungan bagi semua kegiatan mereka. Daerah perbatasan sering juga mereka manfaatkan untuk melarikan diri dan mempertahankan diri dari aktifitas militer Indonesia. Sehingga bagi Indonesia mempertahankan, mengamankan dan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia-PNG menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dan PNG merupakan partner utama untuk mencapai hal tersebut.

Indonesia secara nyata melakukan lobby lebih intensif dengan PNG daripada negara-negara MSG lainnya yang menunjukkan pentingnya peran PNG untuk mendukung claim Indonesia terhadap Papua.

Diplomasi pertahanan sebagai alat bagi Indonesia saya berpendapat tentang pentingnya peran ini bahwa di dalam dilaksanakannya koordinasi atau diplomasi dengan PNG ini, saya mempromosikan sebuah terminology sebetulnya bukan terminology asing tentang diplomasi pertahanan sebagai alat berkomunikasi. Bahwa mengejar pembangunan militer yang kuat membutuhkan banyak hal yang secara fakta Pemerintah Indonesia dapat menjalankan diplomasi sebagai garis pertahanan pertama untuk negara. Sebab membangun kekuatan bersenjata tidak bisa serta merta dalam waktu beberapa bulan atau hanya 1 atau 2 tahun. Namun, diplomasi dengan berbagai kegiatan yang kita sampaikan dan kita kembangkan itu dapat dilakukan secara nyata tiba-tiba dengan berbagai bentuk yang memungkinkan.

Dengan gagasan itu Republik Indonesia atau Indonesia membangun jaringan pertahanan dengan militer yang luas dengan banyak mitra strategis. Di Asia Tenggara misalnya militer Indonesia secara teratur melakukan berbagai pertukaran personil, program pelatihan maupun patroli laut terkoordinasi. Seperti konsep Rancangan Undang-Undang yang akan diratifikasi hari ini.

Dengan menggunakan kerangka kerja multilateral yang berpusat pada Asean, juga membahas berbagai masalah keamanan dan mengembang secara praktis pertahanan regional dan ekstra regional di bidang yang menjadi perhatian Bersama. Diplomasi pertahanan dilaksanakan Indonesia menjadi salah satu kekuatan pertahanan untuk mengatasi masalah keamanan. Sekaligus menggunakan atau merupakan alaytuntuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas.

Dari berbagai kegiatan kerjasama yang ingin dilakukan antara Indonesia dengan PNG, menurut sbahwa diplomasi pertahanan harus menyeimbangkan antara agenda diplomatic yang luas dan kepentingan keamanan suatu negara. Dalam refleksi itu diplomasi pertahanan Indonesia berfokus kepada 3 agenda utama, yaitu membangun rasa saling percaya, meningkatkan kemampuan militer dan mengembangkan basis industry pertahanan. Dalam 3 hal ini yang paling memungkinkan menurut saya adalah membangun rasa saling percaya, kemudian meningkatkan kemampuan militer. Maka di dalam Rancangan Undang-Undang ini adanya pertukaran personil, pertukaran bentuk latihan menjadi tepat jika dilaksanakan. Namun, kita menggunakan bahasa yang lebih soft, yang lebih lunak dengan ini bahwa diplomasi pertahanan menjadi sebuah terminology yang bisa kita pakai untuk menghindarkan berbagai kecurigaan dan berbagai bentuk dugaan-dugaan negara lain yang ada di kawasan kita.

Untuk membangun kepercayaan tersebut, diplomasi pertahanan melaksanakan kegiatan seperti kunjungan kenegaraan, konsultasi, dialog, pertukaran informasi dan pertukaran personil. Namun, masalahnya disini adalah separatism belum menjadi perhatian dalam isu keamanan pertahanan. Terutama yang menjadi fokus pertahanan diplomatic Indonesia. Pendekatan selama ini atau diplomasi yang dilakukan selama ini lebih merupakan dialog atau bahkan juga operasi militer. Namun, barangkali dengan menimbulkan atau meningkatkan rasa saling percaya antara

kedua negara dengan menggunakan terminology yang lebih lembut, maka serta merta nantinya adalah isu separatism menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam berbagai kegiatan diplomatic tersebut.

Sejauh ini hubungan Indonesia dan Papua Nugini sangat baik, terutama kepentingan kedua negara dalam keamanan perbatasan. Tujuan Indonesia utama dalam perjanjian Indonesia dengan PNG adalah untuk memerangi gerakan Papua Merdeka, Indonesia menganggap OPM tidak hanya sebagai ancaman. Jadi saya ulangi OPM tidak hanya sebagai ancaman serius terhadap integritas territorial tetapi lebih dari itu juga merupakan ancaman terhadap keamanan Indonesia.

PNG juga secara teratur menyatakan kebijakannya untuk menentang setiap kegiatan dan kampanye melawan Indonesia dan tidak mendukung serta tidak mengakui seruan Papua untuk kemerdekaan. PNG sangat jelas dalam hal ini mendukung kebijakannya bahwa mereka akan terus mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian kesempatan untuk kerjasama akan sangat bagus bagi Indonesia untuk fokus memecahkan masalah sparatis di Papua, maka kelompok OPM yang telah lebih atau yang lebih dahulu memahami wilayah geografis dan menggunakan kawasan perbatasan karena jalur masuk dan keluar bisa diatasi jika Indonesia bisa menggunakan diplomasi pertahanan untuk mendorong terciptanya kerjasama pertahanan dengan PNG.

Isu kepentingan nasional antar kedua negara atau national interest akan berjalan sejajar dengan kepentingan masing-masing. Isu politik antara kedua negara menggambarkan ketergantungan kedua negara untuk bekerjasama. Bagi Indonesia, perhatian utama adalah memastikan Papua Nugini melakukan tindakan untuk melawan OPM atau mencegah OPM atau mengakomodasi OPM. Dan untuk Papua Nugini fokusnya adalah menjamin kekuatan Papua Nugini itu sendiri.

Indonesia menganggap PNG sebagai mitra strategis utama, merupakan aktor kunci penting di negara-negara pasifik dan negara-negara Melanesia. Pengakuan seperti itu terbukti, Indonesia dan PNG berkomitmen untuk mempromosikan dan memperkuat kemitraan komprehensif berdasarkan saling menguntungkan dan saling menghormati integritas territorial yang merupakan pernyataan Bersama Indonesia dan PNG.

Fokus diplomasi pertahanan yang saya tawarkan disini adalah salah satunya menekankan kepada perjanjian kerjasama pertahanan bilateral. Ini menjelaskan bahwa Indonesia mampu melakukan diplomasi pertahanan terhadap PNG untuk menciptakan hubungan spesifik bidang keamanan. Di dalam diplomasi bidang pertahanan ini sendiri saya menambahkan sebuah definisi bukan hanya antara hubungan militer dengan militer dengan rasa damai tetapi dan juga pemahaman antara dua negara atau lebih. Mungkin dalam keadaan berseteru atau dalam keadaan berkompetisi tetapi juga saling melibatkan masalah unsur budaya. Dalam hal ini tentunya maka Indonesia atau militer Indonesia merupakan kesempatan bagi mereka untuk mempelajari budaya yang ada di Papua sana untuk lebih memudahkan berinteraksi, memudahkan rasa saling percaya. Sebab budaya atau culture itu sendiri merupakan fungsi strategis yang bisa dikembangkan oleh militer Indonesia, tidak semata-mata kekuatan bersenjata.

Dari paparan tersebut, konklusi yang saya sampaikan sebagai berikut bahwa kerjasama pertahanan Indonesia dan PNG ini untuk mengatasi masalah OPM atau masalah keamanan diperbatasan setidaknya bisa ada solusinya, baik untuk meminimalisasi gerakan OPM atau untuk memperkuat daerah pertahanan dari berbagai gangguan keamanan. Indonesia secara intens memerangi OPM karena perbatasan antara Indonesia dan PNG telah menjadi tempat perlindungan bagi OPM dan para pendukungnya untuk memulai kegiatan mereka. Selain itu, penyebrangan perbatasan telah dilakukan oleh OPM untuk menyembunyikan, melarikan diri dan bahkan untuk meningkatkan ketahanan bersenjata mereka terhadap aktifitas ofensif militer Indonesia.

Selanjutnya untuk mempertahankan integritas wilayah dan memberantas OPM telah menjadi kebijakan luar negeri yang diprioritaskan oleh Indonesia dan PNG adalah merupakan mitra kunci untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Melalui diplomasi pertahanan diperbatasan, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan PNG dapat dibentuk dengan berbagai kesepakatan yang menjelaskan bentuk kerjasama baik politik maupun militer.

Lanjut, langkah-langkah kerjasama dapat digunakan dalam bentuk operasi militer

gabungan atau pertukaran informasi serta penanganan isu-isu perbatasan lainnya. Oleh karena itu, adalah mungkin bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi pertahanan terhadap PNG mengingat peran PNG sebagai aktor yang sangat strategis di wilayah pasifik tersebut.

Terkait dengan perbatasan kedua negara, untuk mengembangkan kerjasama pertahanan yang lebih intensif baik untuk tujuan politik atau kedaulatan negara dan meningkatkan kepercayaan serta secara teknis untuk operasional kerjasama penanganan perbatasan dalam menghadapi berbagai bentuk aksi sparatis terutama OPM.

Kesimpulan kecil dari yang saya sampaikan adalah bagi Indonesia, kerjasama dengan PNG lebih menekankan dari sisi politisnya dengan melibatkan militer kita. Bagi PNG itu sendiri merupakan kepentingan ekonomi di dalam mengakomodasi kepentingan lainnya terhadap Indonesia.

Posisi PNG menjadi sangat strategis dengan adanya MSG saat ini, kita yang paling dekat negara dengan Indonesia saat ini adalah Papua Nugini untuk bisa kita jadikan sebagai buffer zone kita di dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin ditimbulkan oleh MSG.

Demikian kesimpulan saya Pimpinan Rapat, terima kasih ata perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Rodon paparannya.
Kami lanjutkan kepada ba Teuku.

PAKAR (DRS. TEUKU REZASYAH, M.A., Ph.D.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Selamat siang dan salam sejahtera,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang tercinta Abang Rodon pakar diplomasi pertahanan RI, guru saya di sekolah tinggi intelijen.

Sebagai warga negara Indonesia terus terang saya sangat tersanjung mendapat undangan untuk berada dalam forum ini. Pertama, secara akademis ini menantang Pak, kami dari kalangan perguruan tinggi selalu berpikir apakah pengetahuan kita ini paralel dengan praktek dilapangan. Yang kedua, sebagai orang Indonesia saya bangga bahwa negara saya sedang mempraktekkan good governance. Jadi policy yang dibuat itu dites berdasarkan metode tesis, lawan anti tesis, annti lahir sintesis.

Selanjutnya juga menyadarkan saya bahwa urusan-urusan politik luar negeri, urusan-urusan defence ini sudah tidak elitis lagi, namun sudah menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, izinkanlah saya menatap dokumen hukum yang sudah ada di hadapan saya ini secara pasal demi pasal. Bisa kita masuk ke halaman selanjutnya.

Mohon maaf, tertulis tidak clear ya. Namun, izin saya membacakan apa yang telah saya persiapkan. Mungkin data tanggapan bisa dirubah font-nya menjadi bold atau dihitamkan.

Nomor satu, seluruh data pada halaman ini adalah formal, standar dan menunjukkan upaya untuk meningkatkan hubungan di bidang pertahanan. Karena itu, dokumen ini sangat layak untuk menjadi Undang-Undang namun dengan beberapa catatan penting. Misalnya, kita sudah memiliki hubungan yang lama dengan Papua Nugini dari tahun 1975. Dimana kita berdua membangun hubungan diberbagai bidang politik, ekonomi, keamanan, Pendidikan dan perbatasan. Selanjutnya hubungan menjadi semakin mendalam pada tanggal 27 Oktober 1986, pada saat kita Bersama-sama PNG menandatangani dokumen namanya treaty of mutual respect frenship and corporation dimana kita berdua Bersama-sama setuju bekerjasama dalam berbagai

bidang sekaligus, ekonomi, politik, berdasarkan prinsip-prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling menghargai keutuhan wilayah.

PNG merupakan negara kunci di Pasifik Selatan dan Bersama Fiji berani berseberangan dengan mitra mereka di melanesian spearhead group atau MSG yang senantiasa menuntut kemerdekaan etnis Melanesia yang hidup di Papua. Kelima, dukungan PNG dan Fiji memungkinkan Republik Indonesia menjadi observer di MSG pada tahun 2011 silam dan selanjutnya pada tahun 2015 Republik Indonesia menjadi associate member. Dengan demikian, persetujuan dokumen ini menjadi Undang-Undang merupakan sebuah meniscayaan mengingat sudah tingginya hubungan di tingkat bilateral dan regional.

Kedekatan ini memungkinkan RI untuk secara langsung memonitor pergerakan dari United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP di dalam MSG yang sudah memiliki status sebagai observer. Kedekatan dengan PNG juga berpotensi menggagalkan upaya diplomasi ULMWP yang menggunakan jejaring lamanya yakni The West Papua National Coalition for Liberation and The State Federal Republic of West Papua dan juga The National Parliamentary of West Papua. Jadi saya membayangkan suatu skenario dimana kita akan sulit berhadapan dengan isu ini bukan hanya di level melanesian spearhead group tapi juga di level yang lebih luas.

Kita masuk kepada slide yang selanjutnya, saya izinkan menanggapi pasal demi pasal dan mohon maaf ternyata terjadi sulit melakukan inter operability antara komputer saya dengan komputer disini yang lebih canggih. Pasal 1 dan Pasal 2, menunjukkan prinsip-prinsip yang perlu dijunjung tinggi dan hendaknya dijadikan kata kunci dalam setiap tingkatan hubungan militer dan non militer, ini untuk Pasal 1 dan Pasal 2.

Selanjutnya pasal 3 sudah jelas, namun khusus untuk nomor 1 hendaknya dialog dan konsultasi diselenggarakan secara terbuka sehingga tidak menciderai kredibilitas PNG dalam MSG. Maklum dikalangan MSG itu sedang mulai adalah sinyal bahwa PNG merupakan kuda troya Indonesia. Untuk Pasal 3 khususnya di nomor 4, di mohon kehatian-hatian mengingat buku putih pertahanan Australia tahun 2016 pada halaman 35 bagian 1.16 memberikan kedudukan khusus pada PNG sebagai berikut: Australia must play a leadership role in our immediate neighborhood spinning Papua Nugini, Timor Leste and Pacific countries in support of our national interest. Jadi PNG ini bukan negara yang kedaulatannya sederajat sama seperti kita, dia masih dalam konstitusi dia kepala negaranya adalah seorang gubernur jenderal yang merupakan perwakilan dari kerajaan Inggris.

Khusus untuk nomor 6 tentang mendorong interoverabilitas angkatan bersenjata kedua pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan-latihan. Saran kami adalah dapat dibatasi pada kerjasama di lingkup military operation other than work khususnya dalam menjawab terjadinya bencana alam dan kecelakaan penerbangan dalam negeri PNG yang dekat dengan wilayah RI. Kemudian untuk nomor 7 tentang kerjasama dibidang-bidang lain sesuai dengan kepentingan Bersama. Dalam pandangan kami aspek perbatasan sangatlah penting, karena sesuai dengan dokumen yang dibuat PNG yang berjudul Papua Nugini Tweenty Fifty Vision yang dibuat oleh National Strategic Plan Task Force tahun 2008 silam dinyatakan dalam item 1.17.8.2.3 elocate founding to the security forces for relevan invest structure including application of space science and technology to facilitate internal and external border surveillance, covering sea, land and borders.

Kemudian masih pada dokumen yang sama nomor 1.17.8.2.4 kata kuncinya adalah allocate funding for relevan state agencies to assist the security forces in borders enforcement. Jadi kerjasama perbatasan ini sangat penting, karena panjangnya juga sudah sekura 760 KM.

Kemudian masih untuk nomor 7 item dari Papua Nugini 2015 vision adalah security and law and order remain mature concern that ... national development, the security of our soft territory and boundaries. Jadi secara jujur Pemerintah PNG itu sudah mengatakan bahwa perbatasan dia rentan dan kita juga punya hirauan yang sama, apalagi kalau saya melihat bahwa kata-kata kunci yang dipakai dalam Nawacita kita itu kalau kita urut dari nomor 1 sampai 9 adalah kata kunci satu adalah rasa aman, kata kunci nomor dua adalah tidak absen, kata kunci tiga adalah pinggir, kata kunci empat adalah menolak negara lemah, kata kunci lima adalah kualitas hidup manusia, kata kunci enam adalah produktifitas rakyat, kata kunci tujuh adalah kemandirian ekonomi, kata kunci delapan adalah karakter bangsa, kata kunci sembilan adalah

kebinekaan. Jadi dalam pandangan saya kalau kerjasama dibidang perbatasan dijadikan fokus oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini, saya pikir tidak akan jadi masalah dalam negeri.

Izin masuk pada slide yang selanjutnya halaman 3 Pasal 4, yang berjudul pengaturan pelaksanaan sudah jelas dan saya yakin Pemerintah Indonesia sudah sangat berpengalaman menanganinya. Namun, kita mengharapkan untuk Pasal 4 ini kehati-hatian guna menghindari tanggapan miring dari negara lain. Kalau kita amati buku putih pertahanan Australia tahun 2016, misalnya pada bagian 3.7 ditemukan adanya peringatan sebagai berikut. Australia can't be secure if our immediate neighborhood including Papua Nugini, Timor Leste and Pacific Island Countries become atau source of freed to Australia. This include the freed of foreign military power siking influence in ways that could challenge the security of our maritime approaches or trans national crime targeting Australia interest. Jadi mohon pada saat kita menjabarkan pasal demi pasal, prinsip keterbukaan itu tinggi. Jangan sampai ada kekhawatiran dari Australia bahwa kita mencoba menggalang Papua Nugini sehingga melakukan perilaku yang bertentangan dengan perjanjian keamanan yang sudah dibuat sebelumnya dengan Australia.

Pasal 5 yang berjudul komite Bersama sudah jelas. Namun dapat diberikan saran sebagai berikut bagi mereka yang bertanggungjawab. Saran kami adalah pertama, pernah bertugas di wilayah kerja Kodam 17 Cendrawasih maupun Kodam 18 Kaswari. Kedua, agar memiliki kepekaan yang tinggi atas budaya Melanesia termasuk solidaritas dalam MSG. Ketiga, agar memiliki penguasaan bahas Inggris pada tataran baik. Keempat, komitmen tinggi menjadikan kerjasama ini sebagai bagian integral dari hubungan bilateral jangka panjang sehingga terjamin penganggarannya dalam APBN.

Kita masuk dalam slide berikutnya, perihal Pasal 6 hak atas kekayaan intelektual. Untuk Pasal 6 perlu dipelajari berbagai dokumen pertahanan yang telah ditandatangani PNG dengan negara lain, khususnya pada aspek hak kekayaan intelektual guna menghindari terjadinya kesilapan pemahaman. Terus terang kita punya masalah ini dalam hal kita berurusan dengan Republik Rakyat Cina.

Kemudian masih dalam urusan Pasal 6 atau hak kekayaan intelektual perlunya mempelajari buku putih pertahanan Australia tahun 2016. Dimana dikatakan, our relationship is under pin by the 2013 joint declaration for atau new Papua Nugini-Australia partnership with recognize that Australia and Papua Nugini have about history of working closely to address commend security challenges. Jadi jangan sampai hak-hak kita ada di berbagai industry strategis itu pada hari ini kita hadirkan dengan PNG nanti pada Magrib sudah berada di Australia.

Kemudian masih pada dokumen yang sama item 2.62 dari buku putih pertahanan Australia dikatakan bahwa, geografi history business and personal link the Australian interest closely to the stability and prosperity in our immediate neighborhood spinning Papua Nugini, Timor Leste, Pacific Island Countries in the South Pacific. Jadi saya khawatir, kita mungkin bisa bersikap konsisten dengan HAKI yang ada tapi belum tentu mitra kita. Apalagi pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) kita perlu mewaspadaai kewarganegaraan ganda dari pejabat pertahanan PNG saat ini dan di masa mendatang. Mengingat tingginya potensi ekonomi dari sebuah informasi rahasia, sesuai amandemen pada constitution and us citizenship act tahun 2016, maka warga Papua Nugini dapat juga merupakan warga negara Australia, Fiji, Jerman, Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Inggris, USA dan Vanuatu.

Kita masuk pada slide yang selanjutnya, tanggapan untuk Pasal 7 Ayat (3) masih perihal kerahasiaan. Sulit sekali memperoleh jaminan dari pihak PNG karena itu prinsip kewaspadaan harus diutamakan oleh Republik Indonesia, karena terdapat potensi kesulitan yang akan dihadapi oleh PNG jika mendapatkan permintaan dari Inggris dan Australia mengingat status Papua Nugini secara konstitusional adalah sebagai berikut. *Papua New Guinea is a constitutional monarchy recognising Queen Elizabeth II as head of state, represented by a Governor-General who is nominated by parliament and serves for a term of six years.* Pasal 7 Ayat (3) secara teori sulit dipraktikkan, terutama sekali di negara yang sedang berkembang yang Pemilunya kental dengan keuangan dan Parpolnya cair sekali dalam koalisi.

Untuk Pasal 8 tentang pembiayaan mengingat pentingnya dokumen ini, maka segala bentuk pembiayaan perlu diprioritaskan dalam APBN. Untuk Pasal 9 tentang penyelesaian sengketa mengingat adanya potensi sengketa dapat diberikan saran sebagai berikut. Perlunya

otoritas pertahanan RI sejak dini, mewaspadaikan potensi sengketa yang muncul, baik yang terjadi dalam konteks bilateral maupun akibat pihak ketiga yang merasa kepentingan nasionalnya terganggu.

Selanjutnya, segala bentuk pencapaian maupun kesulitan dari persetujuan ini perlu dikonsultasikan dengan DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat serta dikoordinasikan dengan BIN, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri RI.

Kita masuk ke slide selanjutnya, untuk Pasal 11 tentang pemberlakuan keabsahan dan pengakhiran. Untuk Pasal 11 segala pencapaian maupun kekurangan yang diakibatkan oleh persetujuan ini perlu dievaluasi secara internal oleh otoritas pertahanan RI. Dan untuk itu digunakan standar masa yang lebih ketat yang hasil akhirnya semoga dapat diwaspadai 6 bulan sebelum masa 5 tahun itu berakhir.

Dan terakhir, guna mewaspadaikan pengakhiran dari persetujuan ini, baik oleh RI maupun PNG maka jangka waktu 10 hari yang dilakukan pada Ayat (2) harus benar-benar diwaspadai oleh otoritas pertahanan RI dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Pak Teuku dan Bapak Rodon. Kita masuk ke pendalaman, barangkali dari sebelah kanan, kalau tidak ada dari kiri? Tidak ada.

Silakan Bapak Asril.

WAKIL KETUA/F-P. GERINDRA (MAYJEN TNI (PURN) ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Selama ini PNG kita anggap memang strategis dan penting, karena berbatasan langsung. Saya khawatir pengalaman kita di Timor-Timor dulu, karena pernah kesana itu selalu ada istilahnya penasehatnya dari tentara Australia. Disana Panglima TNI-nya hanya pangkat Brigjen, dimana-mana ada ini tentara Australia. Nah, saya khawatir ini, kita pengalaman di Timor-Timor gara-gara ini.

Bagaimana menurut Bapak Rodon dan Bapak Teuku, hal ini seperti apa pengaruh kepada Pemerintah PNG. Ini yang perlu saya tanyakan, pengalaman disana sampai sekarang antara aman dan tidak PNG itu.

Terima kasih, ini saja Pak.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, secara berturut-turut dari Bapak Rodon kalau ada yang ingin disampaikan.

PAKAR (DR. RER. POL. RODON PEDRASON, M.A.):

Terima kasih Pak.

Tentang pengalaman Indonesia di Timor Leste atau di Timor-Timor, tentang pengaruh masuknya Australia ke wilayah tersebut. Seperti kita ketahui Pak, bahwa setiap negara ada di wilayah tertentu pasti ada kepentingan. Kita melihat kepentingan Australia apa yang ada di PNG Pak, sehingga dalam hal ini kita menginventarisasi persoalan-persoalan yang mungkin yang akan ditimbulkan oleh Australia. Sejauh ini sebelum Papua Nugini memerdekakan diri mereka di bawah administrasi Australia. Terbukti sebelum tahun 1975 kita mengadakan perjanjian dengan pihak Australia, meskipun mewakili Papua Nugini.

Saya berpendapat sejak awal bahwa persoalan yang kita hadapi tidak sama dengan persoalan Timor-Timor. Kekhawatiran tentang ini tidak perlu menjadi beban pikiran kita, mengingat kita tidak dalam sebuah proses atau prosesi menempatkan pasukan kita di wilayah Papua Nugini, tidak juga kita menempatkan Pemerintahan kita seperti di Timor-Timor, tapi lebih kepada hubungan bilateral kedua negara.

Di dalam hal ini seperti tadi disebutkan oleh Pak Teuku perlunya transparansi. Transparansi ini memang dapat kita keluarkan menjadi secara resmi berupa defence white paper

buku putih sehingga kecurigaan-kecurigaan yang ditimbulkan atau barangkali menjadi suspisinya Australia dapat kita minimalisasi.

Saya merasa bahwa kasus yang dihadapi antara Indonesia, Australia dengan Papua Nugini sangat berbeda dengan kasus yang akan dihadapi antara Pemerintah Indonesia dengan Timor-Timor sebelumnya. Persoalan yang sangat mendesak bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana Papua Nugini secara nyata atau tegas menyatakan mereka berada di posisi kita di dalam mendukung untuk mencegah movement atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak-pihak sparatis disana.

Jika kita menyatakan itu dalam berbagai Undang-Undang yang akan kita siapkan ini, MoU yang akan kita siapkan saya merasa atau berpikiran bahwa kekhawatiran kita terhadap PNG atau terhadap Australia menjadi tidak terlalu nyata. Dalam salah satu klausul menyebutkan memang adanya interprobability, interprobability tidaklah serta merta bahwa kita harus memiliki senjata yang sama dengan pihak PNG atau Australia. Tetapi di dalam interprobability yang penting adalah bagaimana setiap personil yang ada di lapangan mampu berkomunikasi, mampu melakukan exchange data dan melakukan berbagai kegiatan terkait masalah keamanan.

Ada 3 komponen setidaknya terkait dengan interprobability, yang pertama terkait dengan menyangkut masalah hardware-nya, tentang peralatannya, tentang persenjataannya, termasuk sistem yang digunakan. Yang kedua, terkait dengan masalah prosedur itu terkait dengan doktrin maupun prosedur itu sendiri. Dan yang ketiga, human atau manusianya sendiri berkenaan dengan masalah terminology. Jika 3 komponen ini kita bekali kepada personil kita yang ada diperbatasan nyambung dengan personil PNG yang ada diperbatasan, saya kira kekhawatiran kita itu menjadi bisa kita tekan serendah mungkin Pak.

Tadi Bapak Teuku mengatakan bahwa kemampuan bahasa sangat diperlukan, namun di dalam konsep diplomasi bahwa budaya menjadi hal utama untuk bisa dipahami oleh setiap prajurit kita. Kelemahan kita selama ini adalah itu budaya yang tidak bisa kita pahami, akhirnya memaksakan kehendak kita. saya mengilustrasikan pada saat tahun 2007 saya ke Lebanon waktu itu melakukan study tentang perlu tidaknya pasukan kita kesana, seminggu sebelum saya sampai disana itu pasukan Spanyol dihabisi oleh penduduk setempat itu 11 orang. Tetapi pasukan kita yang sudah ada disana justru bisa berbaur dengan orang sana dengan menggunakan pendekatan budaya Pak. Yang kalau di pihak UN sendiri budaya yang dikembangkan Indonesia tidak bisa masuk sebab sangat berbeda dengan negara-negara Anggota PBB lainnya atau UN lainnya.

Nah, saya berpikir dengan kita memahami budaya, keunggulan prajurit kita dalam memahami budaya setempat menjadi faktor kunci agar kejadian Timor-Timor tidak kembali terulang di dalam perjanjian antara Indonesia dengan PNG.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan Bapak Teuku.

PAKAR (DRS. TEUKU REZASYAH, M.A., Ph.D.):

Terima kasih Bapak.

Benar PNG strategis bagi kita karena berbatasan langsung dengan Indonesia. Pentingnya batas ini, ini diyakini oleh para pemikir strategis Indonesia yang berpikir sebagai konsentrik. Jadi amankan wilayah kita dulu kemudian baru kita kondisikan agar wilayah di luar kita itu aman. Mengapa? Karena secara teori namanya ini intermastic, jadi kalau kita di dalam ini tidak kuat maka gejolak diluar itu dalam tempo sekian detik itu bisa menerobos ke dalam Pak. Itu secara teori, jadi lingkungan di Indonesia harus aman dan lingkungan keluar Indonesia Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Pasifik, kemudian Asean dan wilayah global itu saling berpengaruh.

Dan bagaimana dengan banyaknya penasehat militer Australia di Papua Nugini, ya ini menurut pendapat saya ini adalah logika daripada negara penjajah dengan eks jajahannya. Bisa kita lihat pada saat Indonesia merdeka, Belanda datang dengan berkedok sebagai sekutu dan menghajar kita habis-habisan pada tahun 1947-1948.

Jadi Papua Nugini pun berpikir walaupun Inggris Raya sudah memberikan kemerdekaan kepada Papua Nugini, namun negara ini masih belum level untuk bermain sendirian di dalam hubungan internasional. Jadi polanya itu adalah Australia-PNG itu seperti top dog dan under dog. Top dog itu yang meyalak sekali dan under dog yang menyalah berulang-ulang dan under dog itu takut kepada top dog. Karena status Australia dikawasan ini luar biasa, Australia ada kekuatan regional secara militer, kapal selamnya di atas Indonesia, F18 dia punya, F35 dia punya, kemudian Australia merupakan kekuatan ekonomi regional dimana negara-negara di pasifik selatan itu pembangunan manusia, pembangunan Pendidikan, pembangunan infrastruktur bahkan pembuatan GBHN itu dibagi dua antara mana yang dilakukan oleh New Zeland dan juga mana yang dilakukan oleh Australia.

Saya melihat karena saya berkuliah di Selandia Baru dan juga di New Zeland itu pelajar-pelajar dari Papua Nugini dan pelajar dari pasifik selatan itu dari semua disiplin ilmu itu ada masing-masing kampus. Jadi begitu mereka kembali, maka model-model pembangunan yang mereka buat itu adalah model-model pembangunan yang mereka pelajari di negara asal mereka sekolah, baik itu Selandia Baru maupun Australia.

Australia memiliki tambang yang luar biasa di Papua Nugini dengan nama BHP. Saya melihat bahwa memang di semua level kepemimpinan di militer itu selalu ada seorang namanya itu penasehat militer dari Australia. Ya tentunya ini mungkin berasal dari perasaan bahwa janganlah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang lepas kendali. Tapi saya perhatikan memang begitu Pak, selalu ada Australia Defence advisor dan dia punya kantor khusus di satuan-satuan militer yang ada di Papua Nugini tersebut.

Ini merupakan satu kenyataan sejarah yang tidak bisa kita elakkan dan untuk itu mohon pada saat kita mengoperasionalkan perjanjian ini faktor sensitifitas harus kita perhatikan jangan sampai Australia merasa bahwa Papua Nugini ini akan kita tarik dari orbitnya. Dan juga ada kesungkapan dari Papua Nugini sendiri, apakah Australia sudah layak mengizinkan saya lepas landas sehingga saya bisa berinteraksi dengan Indonesia pada level yang tidak akan mengganggu kepentingan nasional Australia.

Jadi dalam pandangan saya kalau kita bergerak di level kerjasama pertahanan dan diperbatasan, maka Indonesia memiliki claim yang kuat dimana kita mengatakan dalam kata-kata kuncinya Pak Jokowi dari 1 sampai 9 itu kata kunci Nawacita 1 rasa aman, Nawacita 2 tidak absen, Nawacita 3 penggiran, kata kunci pinggiran ini cocok. Jadi kerjasama pertahanan diperbatasan bisa menarik energi dari kementerian-kementerian teknis yang lain. Misalnya kerjasama pertahanan diperbatasan yang baik juga merupakan kepentingan dari Kementerian Dalam Negeri, kepentingan juga dari Polri, kepentingan juga dari BIN. Jadi saya melihat kalau kita menjawab harapan PNG dalam Papua Nugini 2015 Vision yang mengharapkan kerjasama diperbatasan maka cant go-nya besar.

Selanjutnya juga bagaimana selanjutnya kita tidak bisa menyalahkan sudah adanya hubungan simbiotik antara Australia dengan PNG. Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang Abang saya katakan tadi ada membuat keterbukaan. Terus terang kalau keterbukaan in Australia melakukannya lewat pembuatan defence white paper, literature Pak. Dananya tidak terbatas, penelitiannya ilmiah, kemudian konsultasinya dengan ke banyak stake holders di dalam dan luar negeri. Dan dia bisa ciptakan defence white paper secara teratur Pak. Kita punya tahun 2003, kemudian tahun 2008 dan kemudian terakhir tahun 2015.

Jadi tidak adanya keterbukaan dari pihak kita ini mungkin bisa membuat negara-negara lain agak takut-takut gitu. Kawan saya menyebutnya "ngeri-ngeri sedap". Jadi cara terbaik kita adalah engage, ini ada cara kita belajar dari Australia, kalau negara lain tidak begitu dekat kita. Kata Australia kita bikin lebih dekat caranya dengan engagement. Australia men-engage kita dan kita bisa praktekan untuk PNG nanti. Engagenya nanti government to government. Misalnya kerjasamanya manis, sering ada annual ministry meeting, kemudian sering pertemuan senior official meeting. Dan manisnya itu adalah kalau kita lihat kabinet sekarang maka akan banyak elit-elit kita yang pernah Pendidikan di Australia. Jadi hal ini membuat Australia itu semakin percaya bahwa ada nilai-nilai luhur dari Australia yang dapat dipraktekan untuk Indonesia, di Indonesia sesuai dengan sistem politik yang ada di Indonesia.

Jadi kita engage PNG, pertama di level Pemerintah, kedua di level Pemerintahan tingkat I dan tingkat II, kemudian people to people. Saya sangat setuju dengan keberhasilan

Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan satu program yang namanya saya lupa namanya. Jadi intinya setiap tahun itu ada mahasiswa asing dari berbagai negara sekaligus berada di Indonesia satu tahun, hidup Bersama masyarakat Indonesia, kuliah di Indonesia dan diakhir tahun mereka menyelesaikan sebuah paper dan juga sebuah karya seni. Dan dengan cara itulah makanya nilai-nilai luhur Indonesia bisa masuk ke dalam alam berpikir di Papua Nugini.

Dan untuk menguasai Papua Nugini secara utuh kita bisa belajar bagaimana Australian Broadcasting commission itu bekerja. Selalu ada tayangan tentang perkembangan di Papua Nugini dan di Pasifik Selatan. Jadi Australia itu sudah berhasil, mungkin tidak lagi secara fisik tapi sudah bisa masuk ke alam pikiran masyarakat Papua Nugini seara hard power dan juga secara soft power.

Jadi karena itulah saya berkesimpulan, oke kita tandatangi ini perjanjian namun kehati-hatian harus selalu kita jaga. Guru saya di pesantren menyebutnya “eling sedurunge ...”, kemudian “waspodo... waseso”.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Bapak Rodon dan Bapak Teuku.

Bapak dan Ibu sekalian,

Kalau sudah tidak ada pendalaman lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan saya kira Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup. Sekali lagi terima kasih atas masukan-masukannya menjadi bagian dari keputusan politik kami nanti ketika mau meratifikasi.

Sekali lagi terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB)

Jakarta, 25 September 2017

a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P.

NIP. 19710106 199003 2 001